

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan suatu daerah. Hal ini disebabkan dalam pembangunan Indonesia, pariwisata memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber devisa negara yang dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu negara. Dalam hal ini pariwisata bukan hanya mencakup mengenai ekonomi, namun juga memperhatikan aspek sosial, budaya serta lingkungan. Berdasarkan *World Tourism Organization* (WTO), pariwisata merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia terutama menyangkut kegiatan sosial dan ekonomi. Pariwisata di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 yang berisi bahwa pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.

Pengelolaan pariwisata dengan baik akan memberikan dampak cukup besar bagi suatu negara seperti menambah pendapatan negara. Sektor kepariwisataan akan disejajarkan kedudukannya dengan sektor lain dalam usaha meningkatkan pendapatan negara, maka kepariwisataan dapat disebut sektor industri pariwisata (Widodo, 2013). Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor pariwisata terbukti memiliki kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Kontribusi tersebut termanifestasi dalam beberapa aspek.

Pertama, sektor pariwisata merupakan salah satu sumber utama devisa negara, yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi makro. Kedua, pengembangan pariwisata di tingkat daerah berkorelasi positif dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), yang selanjutnya dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Ketiga, sektor pariwisata berperan sebagai katalisator pengembangan wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil, melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan infrastruktur. Keempat, pertumbuhan sektor pariwisata menarik investasi baik dari dalam maupun luar negeri, serta menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Kelima, sektor pariwisata mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di berbagai wilayah, yang berkontribusi pada diversifikasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Landasan hukum mengenai pengembangan pariwisata di Indonesia menegaskan bahwa sektor pariwisata bukan sekadar aktivitas rekreasi, melainkan sebuah industri yang terintegrasi dengan upaya pembangunan nasional. Hal ini tercermin dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tentang Pedoman Pembinaan Pengembangan Kepariwisataaan Nasional, khususnya pada Bab 2 Pasal 3, yang menyatakan bahwa pengembangan pariwisata di Indonesia dipandang sebagai pengembangan industri pariwisata yang tidak terpisahkan dari upaya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta negara. Dengan kata lain, pengembangan pariwisata diarahkan untuk memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi dan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki berbagai macam destinasi wisata, memiliki peluang yang cukup besar untuk dapat mengembangkan industri pariwisata menjadi sektor yang layak diperhitungkan untuk mengangkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi daerah. Menurut Buku Saku Kementerian Pariwisata (2016), Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional pada tahun 2014 mencapai 9% atau sebesar Rp 946,09 triliun. Tidak hanya itu, pada tahun 2014, devisa sektor pariwisata telah mencapai Rp 120 triliun dan kontribusi terhadap kesempatan kerja sebesar 11 juta orang (Anggraini, 2017).

Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu wilayah di Indonesia dengan potensi industri pariwisata yang signifikan. Hal ini tercermin dari tingginya angka kunjungan wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, ke berbagai destinasi wisata yang tersebar di wilayah tersebut. Keberagaman daya tarik wisata yang ditawarkan mulai dari keindahan alam, kekayaan kuliner, warisan budaya dan seni, hingga situs-situs bersejarah. Kondisi ini menunjukkan bahwa Jawa Tengah memiliki modal yang kuat untuk mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama perekonomian daerah. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), banyaknya pengunjung daya tarik wisata dan event menurut Kabupaten di Jawa Tengah pada tahun 2022 sebanyak 46.610.128 yang mana angka ini menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2021 sebanyak 21.334.202.

Tabel 1. 1 Jumlah Pengunjung Daya Tarik Wisata dan Event Menurut Kabupaten di Jawa Tengah 2022

Kabupaten	2022		
	Pengunjung (Orang) / Guest (Person)		
	Wisatawan Mancanegara Foreign Guest	Wisatawan Nusantara Domestic Guest	Jumlah Total
1. Cilacap	-	887 091	887 091
2. Banyumas	-	2 626 837	2 626 837
3. Purbalingga	6	2 249 573	2 249 579
4. Banjarnegara	-	1 748 969	1 748 969
5. Kebumen	12	1 461 767	1 461 779
6. Purworejo	-	1 241 210	1 241 210
7. Wonosobo	-	1 224 107	1 224 107
8. Magelang	67 754	2 525 421	2 593 175
9. Boyolali	183	443 053	443 236
10. Klaten	60 461	461 4 755 621	4 816 082
11. Sukoharjo	-	172 295	172 295
12. Wonogiri	-	236 052	236 052
13. Karanganyar	1 548	986 729	988 277
14. Sragen	49	258 353	258 402
15. Grobogan	-	526 195	526 195
16. Blora	2	498 162	498 164
17. Rembang	-	1 075 960	1 075 960
18. Pati	23	950 520	950 543
19. Kudus	11	1 732 989	1 733 000

Kabupaten	2022		
	Pengunjung (Orang) / Guest (Person)		
	Wisatawan Mancanegara Foreign Guest	Wisatawan Nusantara Domestic Guest	Jumlah Total
20. Jepara	5 048	1 780 857	1 785 905
21. Demak	4	1 575 708	1 575 712
22. Semarang	622	3 810 236	3 810 858
23. Temanggung	41	577 920	577 961
24. Kendal	10	773 829	773 839
25. Batang	-	822 099	822 099
26. Pekalongan	-	533 389	533 389
27. Pemalang	-	1 331 076	1 331 076
28. Tegal	-	458 304	458 304
29. Brebes	648	80 290	80 938

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.1 ditunjukkan banyaknya pengunjung daya tarik wisata menurut Kabupaten di Jawa Tengah Tahun 2022. Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki jumlah total pengunjung lokal yang cukup banyak dengan angka 2.593.175 dan total wisatawan mancanegara menyentuh angka 67.754 yang mana jumlah pengunjung ini merupakan jumlah pengunjung wisatawan asing paling banyak di seluruh kabupaten Jawa Tengah pada tahun 2022. Hal ini bisa didapatkan karena Kabupaten Magelang memiliki salah satu situs keajaiban dunia yang telah diakui UNESCO sehingga Kabupaten Magelang mendapatkan keuntungan dalam

promosi yang dapat mencakup wisatawan asing dari seluruh dunia. Kabupaten Magelang, yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, memiliki kekayaan potensi pariwisata yang beragam. Keunikan wilayah ini terletak pada perpaduan antara keindahan alam yang memukau, kearifan lokal, dan warisan budaya yang berpotensi menjadi daya tarik utama bagi wisatawan baik domestik maupun internasional. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Magelang memiliki sumber daya pariwisata yang beragam dan berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

Selain dikenal dengan sejarah Borobudur yang ikonik, pariwisata di Kabupaten Magelang juga tersebar di desa-desa yang ada disekitarnya. Ini dilakukan agar desa sekitarnya mendapatkan dampak dari pertumbuhan ekonomi yang terjadi. Desa saat ini berkontribusi besar dalam perkembangan pariwisata nasional sehingga perlu adanya pengembangan yang nantinya juga dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Pemerintah Republik Indonesia, sebagaimana dinyatakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, memandang pengembangan desa wisata sebagai strategi penting untuk mencapai berbagai tujuan pembangunan nasional. Tujuan-tujuan tersebut meliputi peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, pengurangan tingkat pengangguran, pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, serta promosi kebudayaan. Dalam konteks ini, desa wisata diharapkan mampu mengoptimalkan potensi sumber daya yang dimilikinya melalui pengembangan yang berkelanjutan, sehingga menghasilkan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, pengembangan desa

wisata diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Desa Karangrejo, yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, memiliki potensi wisata yang menarik bagi wisatawan. Keunggulan desa ini diakui secara nasional sebagai desa wisata berkelanjutan, yang dibuktikan dengan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) pada awal Maret 2021 (resourceasia.id). Pengakuan ini menegaskan komitmen Desa Karangrejo dalam mengembangkan pariwisata secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta menjadikannya sebagai model bagi pengembangan desa wisata lainnya di Indonesia.

Kondisi masyarakat Desa Karangrejo secara umum bergantung pada kondisi lahan di desa, serta keberadaan Candi Borobudur seperti menjadi pemandu wisata, pedagang kaki lima, keamanan, serta fotografer (Ningrum, 2022). Desa Karangrejo termasuk desa yang berhasil memperlihatkan kekayaan potensi wisata berupa alam sehingga dapat mencuri perhatian pengunjung. Objek wisata yang terkenal dari Desa ini ialah Punthuk Setumbu dan Bukit Rhema Gereja Ayam. Tidak hanya itu saja, menurut Penelitian Pariwisata dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, berbagai jenis kerajinan seperti kerajinan patung, kerajinan relief, gantungan kunci fiber, dan kerajinan asbak juga merupakan produk unggulan yang dimiliki oleh Desa Karangrejo.

Desa Karangrejo telah mengembangkan Punthuk Setumbu menjadi daya tarik wisata alam populer yang menyajikan pemandangan alam eksotis berupa matahari

terbit pada ketinggian 400 Mdpl. Hal ini lah yang membuat Punthuk Setumbu banyak didatangi oleh wisatawan dan menjadi spot favorit bagi wisatawan yang menyukai fotografi.

Tabel 1. 2 Data Pengunjung Punthuk Setumbu

Bulan	Pengunjung Punthuk Setumbu											
	Domestik						Mancanegara					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Januari	8541	8552	7238	3721	6083	4500	1033	625	205	12	27	798
Februari	5756	6110	4550	1761	3233	2100	1273	762	533	7	31	505
Maret	6117	4794	0	3812	3618	1800	1540	682	0	15	41	1711
April	6752	6328	0	3500	1383	3829	1491	815	0	44	117	1635
Mei	6012	3259	0	2706	9408	3157	1303	754	0	16	469	2112
Juni	1279 9	13650	0	3673	5249	4383	751	537	0	28	918	2735
Juli	9583	8763	0	0	6102	4865	2383	168	0	0	2031	3676
Agustus	8409	5062	0	0	3659	2749	2467	1650	0	0	2949	3937
September	8044	4480	0	0		2329	1506	1338	0	0		2635
Oktober	5202	4314	2499	5736		2240	1217	976	0	18		1676
November	6733	5114	0	3595	2624	2121	621	593	0	19	650	1145
Desember	1393 0	0	0	6834	5834		640	0	0	36	878	

Bulan	Pengunjung Punthuk Setumbu											
	Domestik						Mancanegara					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kabupaten Magelang	97878	70426	14287	35338	47193	34073	16225	8900	738	195	8111	22565

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023

Tabel tersebut menunjukkan bahwa perkembangan jumlah pengunjung daya tarik wisata Punthuk Setumbu cukup baik walaupun terjadi penurunan kegiatan selama rentang waktu tahun 2020 sampai 2021 yang disebabkan adanya pandemi covid-19. Pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Magelang dilaksanakan berdasarkan kerangka kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2015, yang mengatur Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata untuk periode 2014-2034 pasal 35 ayat 2 menjelaskan bahwa optimalisasi organisasi kepariwisataan pelaku usaha masyarakat dilakukan dengan dua cara diantaranya penguatan peran serta pelaku usaha dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan pelaku usaha dan pemerintah, dan pengembangan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.

Untuk mewujudkan pengelolaan Punthuk Setumbu sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan, dibutuhkan pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis). Sebagai wadah partisipasi masyarakat, Pokdarwis menjembatani kepentingan masyarakat Desa Karangrejo dengan Pemerintah Daerah guna pengembangan potensi desa. Namun, dalam praktiknya, pengelolaan oleh Pokdarwis menghadapi beberapa

kendala, seperti menurunnya tingkat partisipasi anggota dan kurangnya transparansi keuangan, sehingga peran Pokdarwis dalam pengembangan Punthuk Setumbu belum berjalan secara optimal.

Partisipasi masyarakat, sebagaimana diungkapkan oleh Anwas (2013:93), adalah upaya yang disadari oleh individu atau kelompok untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, dengan tujuan untuk memberdayakan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Pada pengelolaan Punthuk Setumbu mulai melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk Perangkat Desa, yang berperan sebagai pembina dan pengawas pada tahun 2013 (travel.detik.com, 2019). Sehingga, partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi wisata Punthuk Setumbu sangat diperlukan.

Dengan mempertimbangkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti Desa Karangrejo, khususnya dalam menganalisis bagaimana masyarakat setempat secara aktif terlibat dalam pengembangan wisata Punthuk Setumbu. Penelitian ini bertujuan untuk mempertahankan daya tarik Punthuk Setumbu sebagai destinasi wisata utama dan memberikan kontribusi nyata terhadap pemberdayaan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi masyarakat Desa Karangrejo dalam upaya pengembangan wisata Punthuk Setumbu?
2. Apa sajakah faktor pendorong atau penghambat yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Punthuk Setumbu?

1.3 Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan penelitian ini ialah untuk mengidentifikasi serta menganalisa partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Punthuk Setumbu di Desa Karangrejo dan faktor apa saja yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Punthuk Setumbu.

1.4 Manfaat

Sejalan dengan tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan literatur dan menambah perspektif pembaca terhadap peran masyarakat dalam mengembangkan wisata Punthuk Setumbu di Desa Karangrejo, Kabupaten Magelang. Selain itu, dapat menjadi bahan referensi bagi pihak terkait dalam mengelola wisata agar tetap berkelanjutan dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Manfaat yang diinginkan dari hasil penelitian ini bagi masyarakat adalah dapat dijadikan acuan mengenai kerjasama antar masyarakat yang memiliki kontribusi besar dalam mengembangkan wisata serta mengelola potensi alam yang ada agar berdampak pada kesejahteraan masyarakat Desa Karangrejo.

1.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. 3 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Penulis, Tahun	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
1.	Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Kampung Majapahit sebagai Desa Wisata (Studi di Desa Bejigong Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto). Ditulis oleh Aghnia Norma Septiani pada tahun 2019.	Melihat partisipasi masyarakat dalam mengembangkan Kampung Majapahit sebagai suatu desa wisata.	Kualitatif deskriptif.	Teori tahapan partisipasi	Hasil penelitian ini adalah partisipasi diterapkan dengan lancar dengan melibatkan masyarakat sebagai sumber daya manusia dalam pembangunan dan pengembangan Kampung Majapahit serta partisipasi dalam pengambilan manfaat ditunjukkan dengan pemanfaatan Kampung Majapahit.
2.	Partisipasi Masyarakat dalam Kreativitas Pengembangan Wisata Kampung Tematik (Studi Kasus : Kampung Pulo Geulis, Kota Bogor, Jawa Barat). Ditulis oleh Desnamita, dkk pada tahun 2020.	Menganalisis tahapan dari kreativitas yang dilakukan oleh masyarakat serta jenis partisipasi yang dimiliki oleh masyarakat di Kampung Pulo Geulis.	Kualitatif deskriptif.	Teori tahapan kreativitas dan teori jenis partisipasi.	Hasil dari penelitian ini adalah tahapan kreativitas dari masyarakat di Kampung Pulo Geulis telah sampai di tahap membentuk ide kreatif serta tersedianya sarana atau ruang basis bagi aktivitas yang kreatif

No.	Judul, Penulis, Tahun	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
3.	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada Desa Pujonkidul Kecamatan Pujon Kabupaten Malang). Ditulis oleh Septiofera Eresus Prabowo, Djamhur Hamid, dan Arik Prasetya pada tahun 2016.	Mengkaji bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata.	Kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara.	Teori pariwisata, teori desa wisata, teori partisipasi masyarakat, dan teori pengembangan desa wisata.	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi asyarakat dalam pengembangan Desa Wisata Pujonkidul meliputi partisipasi dalam bentuk buah piker, tenaga fisik, keterampilan dan kemahiran, dan harta benda. Kemudian faktor penghambat dalam pengembangan desa ini ialah karena sumber daya manusia rendah, motivasi yang rendah dalam diri masyarakat, pengurusan perizinan produk makanan khas, politik, dan regulasi. Sementara faktor pendukung masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata karena adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara pemerintah desa dengan masyarakat dan usia-usia produktif.
4.	Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam	Mendeskripsikan tentang pengembangan desa wisata Pentingsari	Kualitatif	Teori pengembangan desa wisata, dan teori	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan Desa Wisata Pentingsari mendapat dukungan

No.	Judul, Penulis, Tahun	Tujuan	Metode	Teori	Hasil
	Perspektif Partisipasi Masyarakat. Ditulis oleh Dinar Wahyuni pada tahun 2019.	dalam perspektif partisipasi masyarakat.		partisipasi masyarakat.	penuh dari masyarakat Pentingsari dan pemerintah daerah melalui partisipasinya dalam kegiatan wisata.
5.	Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata Bongkasa Pertiwi di Kabupaten Badung. Ditulis oleh Ni Made Devy Karnayanti dan I Gusti Agung Oka Mahagangga pada tahun 2019.	Melihat partisipasi warga dalam manajemen desa wisata Bongkasa Pertiwi di Kabupaten Badung.	Kualitatif deskriptif	Teori pengelolaan, dan teori partisipasi.	Hasil dari penelitian ini adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan rencana, melakukan organisasi, implementasi, dan control karena kurangnya sumbangsih manajer desa wisata, kualitas sumber daya manusia yang rendah, serta rendahnya kerjasama antar masyarakat.

Dari tabel diatas, perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya terletak pada perbedaan lokasi studi dan kerangka teori yang digunakan. Pada penelitian pertama yang dilakukan oleh Septiani (2016), lokasi penelitian terletak di Desa Bejigong, Mojokerto dengan teori yang digunakan adalah teori tahapan partisipasi. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Desnamita, dkk (2020) berlokasi di Kota Bogor dengan teori yang digunakan adalah teori tahapan kreativitas dan teori jenis partisipasi. Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Septiora, dkk (2016), lokasi

penelitian terletak di Desa Pujonkidul, Malang, dengan teori yang digunakan diantaranya teori pariwisata, teori desa wisata, teori partisipasi masyarakat, serta teori pengembangan desa wisata. Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2019) berlokasi di Desa Wisata Pentingsari, Sleman dengan teori yang digunakan ialah teori pengembangan desa wisata dan teori partisipasi masyarakat. Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Karnayanti, Mahagangga (2019) berlokasi di Desa Wisata Bongkasa Pertiwi, Kabupaten Badung dengan teori yang digunakan adalah teori pengelolaan dan teori partisipasi. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlokasi di Desa Karangrejo, Kabupaten Magelang dengan menggunakan teori partisipasi Cohen dan Uphoff yang memiliki fokus berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu metode yang digunakan pada penelitian sebelumnya hanya menekankan pada aspek evaluasi dan perolehan masyarakat. Sedangkan, peneliti ingin mengkaji dengan menggunakan keempat aspek partisipasi yaitu partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan suatu program, partisipasi dalam pengambilan manfaat dan partisipasi dalam evaluasi. Selain itu, hasil pada penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa subjek kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah, sehingga peneliti juga ingin mengetahui bagaimana faktor yang mendukung dan yang menghambat pada subjek yang menjadi fokus peneliti.

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat, menurut Sumarto (2003), adalah proses di mana individu dan kelompok sosial berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka, dari perencanaan hingga pemantauan. Pitana (2002) menambahkan bahwa partisipasi lebih dari sekadar sumbangan tenaga atau materi, melainkan partisipasi aktif dalam setiap aspek pembangunan.

Empat jenis partisipasi masyarakat, menurut Cohen dan Uphoff (1979), meliputi partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*), partisipasi dalam pelaksanaan suatu program (*participation in implementation*) partisipasi dalam pengambilan manfaat (*participation in benefits*) dan partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan (*participation in decision making*). Partisipasi ini merupakan partisipasi yang berhubungan dengan gagasan atau ide dalam menentukan solusi alternatif masyarakat untuk kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat dengan jenis ini dilakukan dengan cara menuntut agar ikut serta dalam menentukan arah dan orientasi Pembangunan dan pengembangan. Contohnya ialah dengan menghadiri rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan suatu program (*participation in implementation*). Partisipasi ini berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan seperti menggerakkan sumber daya, dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program.
3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat (*participation in benefits*). Partisipasi ini berkaitan dengan penilaian hasil pelaksanaan program atau kegiatan, baik dari segi kuantitas (persentase pencapaian) maupun kualitas (peningkatan output).
4. Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*). Fokus dari partisipasi ini adalah pada pemantauan dan evaluasi jalannya program, dengan tujuan untuk memastikan bahwa program tersebut mencapai hasil yang diharapkan

Sundariningrum (dalam Sugiyah 2001:38) memberikan perspektif lain tentang bentuk partisipasi, dengan membaginya menjadi dua bentuk berdasarkan bagaimana masyarakat terlibat, diantaranya:

- a. Partisipasi Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

- b. Partisipasi Tidak Langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya.

Partisipasi masyarakat adalah penentuan sikap dan keterlibatan setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta mengambil bagian dalam setiap pertanggungjawaban bersama (Syafiie, 2001:142).

Dari bentuk-bentuk partisipasi yang telah dijelaskan diatas, jika dikaitkan dengan topik penelitian maka peneliti menggunakan teori dari Cohen dan Uphoff untuk memahami dinamika dan efektivitas partisipasi masyarakat secara mendalam.

1.7 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1. 4 Operasionalisasi Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata Punthuk Setumbu Karangrejo Kabupaten Magelang

Konsep	Indikator
Partisipasi masyarakat adalah proses di mana individu dan kelompok sosial berpartisipasi dalam mempengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka, dari perencanaan hingga pemantauan (Sumarto, 2003).	
A. Jenis Partisipasi	
1. Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan (<i>Participation In Decision Making</i>)	1.1 Proses Pengambilan Keputusan Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah. 1.2 Tingkat Keterlibatan Tingkat keterlibatan diukur dengan cara melihat kontribusi masyarakat dalam menghadiri

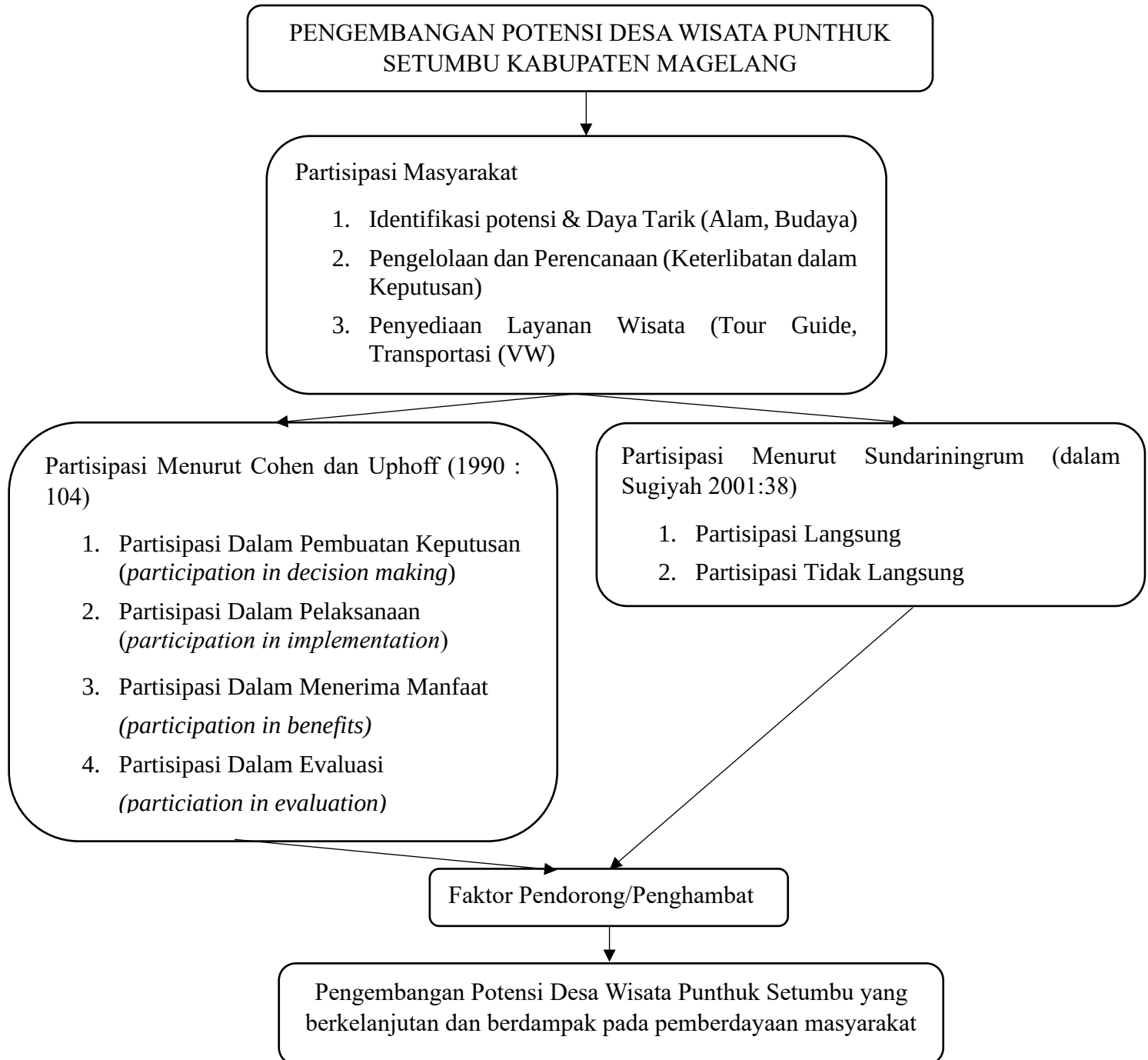
	musyawarah seperti menyuarakan pendapat, mendengarkan secara aktif , serta menanggapi keputusan dalam musyawarah.
2. Partisipasi Dalam Pelaksanaan Suatu Program (<i>Participation In Implementation</i>)	2.1 Tingkat Keaktifan Tingkat keaktifan masyarakat dilihat dari bagaimana masyarakat terlibat secara fisik di lapangan seperti pembangunan jalan, pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas wisata, keterlibatan dalam pengelolaan sumber daya seperti masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan keuangan, alokasi sumber daya, menyediakan tenaga kerja untuk melaksanakan suatu program, peningkatan keterampilan yang dapat diukur dengan seberapa aktif masyarakat ikut serta dalam program pelatihan. 2.2 Kerjasama Kerjasama dapat diukur dari hubungan antara masyarakat dengan pemerintah dalam kegiatan pembangunan dan dalam pelaksanaan program yang telah direncanakan di musrenbangdes.

3. Partisipasi Dalam Pengambilan Manfaat (<i>Participation In Benefits</i>)	3.1 Kualitas Hasil Kualitas hasil diukur melalui efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik secara ekonomi maupun sosial. Indikator ekonomi terlihat dari pengelolaan usaha lokal, sementara aspek sosial tercermin dari adanya bantuan sosial seperti BPJS.
4. Partisipasi Dalam Evaluasi (<i>Participation In Evaluation</i>)	4.1 Umpan Balik (<i>Feedback</i>) Umpan balik diukur melalui partisipasi masyarakat, pemerintah, dan wisatawan dalam menyampaikan saran atau kritik yang konstruktif terhadap berbagai aspek, seperti peningkatan pelayanan, strategi promosi, dan pemeliharaan infrastruktur. Umpan balik ini berperan sebagai mekanisme evaluasi yang mendukung perbaikan berkelanjutan dalam pengelolaan objek wisata. 4.2 Tindak lanjut Keterlibatan dalam evaluasi diukur dari bagaimana masyarakat bersama pemerintah desa dan

	pemerintah daerah turut serta dalam proses pemantauan serta pengawasan dalam keberjalanan program sesuai dengan hasil yang telah di musyawarahkan. Pemerintah daerah dalam hal ini melakukan monitoring, pemerintah desa berperan dalam pemberian ruang dalam penyampaian masukan dan kritikan melalui musyawarah desa, dan masyarakat sebagai pengawas secara langsung di lapangan.
B. Bentuk Partisipasi	
1. Partisipasi Langsung	1.1 Berperan Aktif Dapat diukur dengan kehadiran masyarakat dalam pengambilan keputusan, keterlibatan fisik di lapangan, keterlibatan dalam pengawasan serta memberikan umpan balik dalam pelaksanaan program. 1.2 Menyampaikan Pendapat Dapat diukur dengan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan seperti melalui musyawarah atau rapat.

	1.3 Berkontribusi Dalam Kegiatan Fisik Dapat diukur dengan bagaimana masyarakat ikut serta dalam pembangunan dan perawatan fasilitas seperti jalan, lampu, dan fasilitas pendukung wisata lainnya.
2. Partisipasi Tidak Langsung	2.1 Berperan Pasif Dapat diukur dengan tingkat keterlibatan masyarakat yang hadir dalam rapat atau musyawarah namun pasif atau hanya datang sebagai formalitas tanpa memberikan masukan atau ide. 2.2 Dukungan Sosial Dapat diukur dengan bagaimana masyarakat memberikan dorongan melalui program jaminan sosial dalam aspek kesejahteraan dan perlindungan sosial yang tujuannya agar program yang dijalankan mencapai keberhasilan.

1.8 Kerangka Berpikir



1.9 Metode Penelitian

1.9.1 Desain Penelitian

Dalam rangka memahami permasalahan secara mendalam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini, sebagaimana dijelaskan oleh Denzin & Lincoln (1994), dilakukan dalam konteks alami dan melibatkan berbagai metode penelitian untuk menjelaskan fenomena yang terjadi. Pendekatan kualitatif dalam mazhab naturalisme mengharuskan peneliti untuk berpikir secara menyeluruh (Moeloeng, 2013).

Dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Punthuk Setumbu Desa Karangrejo Kabupaten Magelang, metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan kualitatif. Desain ini memungkinkan pengumpulan data dan informasi yang rinci dalam periode waktu tertentu, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian dengan fokus pada kasus yang diteliti. Selain itu, studi kasus juga dianggap sebagai metode yang tepat untuk menjawab pertanyaan "*how*" dan "*why*" dalam penelitian (Yin, 2008).

Dalam penelitian kualitatif, data yang dihasilkan berupa kata maupun kalimat untuk mengeksplorasi bagaimana fenomena sosial terjadi dengan memberikan deskripsi pada hal-hal yang sesuai dengan masalah yang diteliti dalam hal ini adalah partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata Punthuk Setumbu Desa Karangrejo Kabupaten Magelang.

1.9.2 Situs Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Karangrejo, yang terletak di Kecamatan Borobudur, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Punthuk Setumbu, yang menjadi fokus penelitian, merupakan salah satu destinasi wisata alam dengan tingkat kunjungan tertinggi di wilayah Kabupaten Magelang. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada potensi sumber daya alam Kabupaten Magelang yang dapat dikembangkan sebagai destinasi pariwisata, dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat setempat. Adanya sumber daya alam ini, memberikan kesempatan bagi masyarakat terkhusus masyarakat Desa Karangrejo untuk mengelola salah satu destinasi wisata di Kabupaten Magelang yaitu Punthuk Setumbu. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menelaah bagaimana masyarakat Desa Karangrejo terlibat dalam pengembangan wisata Punthuk Setumbu

1.9.3 Informan Penelitian

Informan yang dituju untuk pengambilan data ataupun keterangan dipilih berdasarkan metode *purposive sampling*, yakni pertimbangan atas kriteria tertentu dengan rasionalisasi bahwa informan tersebut memiliki pengetahuan informasi yang cukup sesuai kebutuhan penelitian. Adapun yang menjadi informan tersebut antara lain adalah :

1. Yusuf Indra Darmawan, S.Kom., M.I.P selaku Adyatama Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif Ahli Muda, Dinas

Pariwisata Kabupaten Magelang

2. Lilik Cahyo Purnomo selaku Pengelola Layanan Operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kabupaten Magelang
3. Nuryazid selaku Pengelola Punthuk Setumbu
4. Masyarakat
 - a. Rohadi selaku anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis)
 - b. Sunarti selaku Pedagang di Kawasan Punthuk Setumbu
 - c. Hani Rifanto selaku anggota Kelompok VW (Volkswagen)
 - d. Eva selaku penyedia jasa layanan *Tour Guide*
 - e. Huda selaku Karyawan Muda Punthuk Setumbu

1.9.4 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan dan dianalisis bersifat kualitatif. Sesuai dengan definisi Hadi (2015:91), data kualitatif adalah data yang tidak dapat diukur secara langsung, melainkan diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data primer, yang dikumpulkan dalam penelitian ini, berasal dari wawancara langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan informan penelitian.

- 2) Data sekunder diperoleh melalui sumber-sumber yang diperoleh tidak langsung, seperti publikasi tertulis (buku, jurnal, artikel), laporan berita, dan dokumen-dokumen pendukung.

1.9.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam tahap pengumpulan data merupakan langkah penting dalam penelitian, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Sugiyono, 2013). Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi pustaka.

1. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data awal yang berfokus pada pencarian informasi dari sumber-sumber literatur yang sudah ada. Literatur yang digunakan dapat dijadikan sebagai referensi untuk memperkuat pemahaman dan menjawab pertanyaan penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh referensi dengan membaca dan mencatat poin-poin penting dari jurnal, artikel, berita, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang digunakan oleh peneliti. Studi pustaka digunakan untuk memahami teori partisipasi masyarakat dalam pengembangan wisata, membandingkan model partisipasi dengan studi literatur lain yang sudah diteliti, serta menganalisis peran pemangku kepentingan berdasarkan literatur yang relevan. Disamping itu, metode ini digunakan untuk memperkuat pemahaman serta argumentasi yang dibangun dalam penelitian partisipasi

masyarakat dalam pengembangan wisata Punthuk Setumbu Desa Karangrejo Kabupaten Magelang.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Wawancara, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono dalam Prastowo (2011:212), adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab. Wawancara mendalam (*indepth interview*) digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan pedoman wawancara yang disusun berupa *interview guide* yang terlebih dahulu dipahami oleh peneliti sehingga wawancara dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya, peneliti mencatat informasi-informasi yang diperoleh dari sumber data dengan cara merangkai kembali dalam bentuk kalimat.

Tidak hanya itu, peneliti juga menggunakan wawancara secara tidak langsung yang dilakukan melalui telepon, atau melalui obrolan daring (*chat*) jika kondisi di lapangan tidak memungkinkan. Wawancara dilakukan dengan melakukan perkenalan, memberikan penjelasan mengenai tujuan wawancara, menjelaskan pedoman wawancara, dan yang terakhir adalah merangkai intisari dari informasi yang telah didapat dan memberikan konfirmasi apabila terdapat informasi tambahan.

3. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi sebagai metode pengumpulan data, yang menurut Widoyoko (2014:46) adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena yang muncul dalam objek penelitian. Konsep observasi yang dikemukakan oleh Faisal dalam Sugiyono (2009:226) mengklasifikasikan observasi menjadi tiga jenis diantaranya :

1. Observasi partisipasi (*participant observation*)
2. Observasi secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation and covert observation*)
3. Observasi yang tidak terstruktur (*unstructured observation*)

Berdasarkan klasifikasi observasi di atas, observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi secara terang-terangan atau terbuka yang mana peneliti melakukan pengumpulan data dengan menanyakan secara terus terang kepada sumber data. Dengan menggunakan metode ini, peneliti dapat berinteraksi lebih leluasa terhadap sumber data dan pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengetahui dengan jelas tujuan peneliti dari awal hingga akhir.

1.9.6 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah penting dalam penelitian untuk menghasilkan kesimpulan dari data lapangan. Miles dan Huberman (dalam

Sugiyono, 2005:91) mengemukakan bahwa analisis data kualitatif adalah proses interaktif yang dilakukan secara terus menerus hingga data mencapai kejenuhan, dan terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Data reduction, atau reduksi data, merupakan langkah peneliti melakukan reduksi atau merangkum hal-hal penting untuk menjawab pertanyaan penelitian, sementara data yang kurang relevan diabaikan. *Data display* atau penyajian data dilakukan dengan melibatkan proses sinkronisasi data yang terpilih dalam bentuk uraian singkat atau sejenisnya untuk mencapai keselarasan dalam menjawab inti permasalahan penelitian. *Conclusion drawing*, atau proses penarikan kesimpulan, merupakan tahapan terakhir yang bersifat sementara dan bisa berubah apabila tidak mendapatkan bukti pendukung dalam tahap pengumpulan data.

1.9.7 Kualitas Data

Kualitas data dan ketepatan metode merupakan dua indikator penting yang menunjukkan validitas penelitian. Dalam konteks penelitian kualitatif, validitas diartikan sebagai upaya untuk memeriksa akurasi hasil penelitian melalui serangkaian penerapan prosedur tertentu (Creswell, 2009). Data dianggap valid jika informasi yang diperoleh dari informan dan sumber terkait tidak memiliki perbedaan atau distingsi dengan realitas yang terjadi di lapangan.

Peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk menguji keabsahan data yang dikumpulkan. Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa triangulasi data adalah penggabungan berbagai sumber dan metode pengumpulan data. Menurut Wijaya (2018), teknik ini melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu. Dalam penelitian ini, triangulasi data dilakukan dengan wawancara mendalam, perbandingan data lapangan dengan hasil wawancara, dan validasi data dengan narasumber yang relevan melalui observasi dan wawancara.